

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dapat dimaknai sebagai proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Proses ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi struktural yang mendorong perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan. Secara filosofis, pembangunan dipahami sebagai upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk mewujudkan aspirasi dan potensi setiap individu secara manusiawi, sehingga tercipta kehidupan yang lebih layak dan bermartabat (Pasulu & Mustika, 2025). Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Proses ini juga ditandai dengan terjalinnya kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah (Maimunah, et.al 2025).

Pembangunan wilayah menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Namun demikian, kesenjangan tingkat perkembangan antar wilayah masih menjadi tantangan serius di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia (Marvina & Yasin, 2025). Kemajuan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar internasional dan dinamika pergerakan faktor produksi. Kondisi ini semakin mempererat keterkaitan antarnegara dalam rantai pasok global serta menuntut peningkatan daya saing nasional. Dalam perekonomian modern yang bersifat terbuka, laju pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dinamika

perdagangan internasional dan interaksi ekonomi lintas batas yang secara langsung mempengaruhi kinerja perekonomian nasional (Endang, et.al 2025).

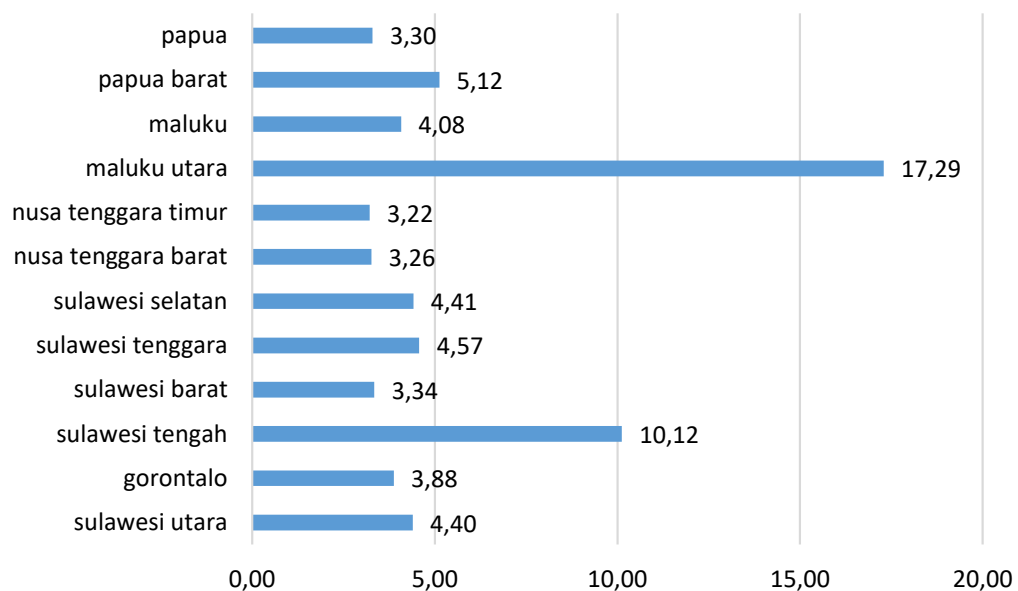
Indonesia memiliki 38 provinsi dengan potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarwilayah. Namun, keterbatasan sumber daya alam tidak selalu menghambat kemajuan daerah apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang kompeten dan produktif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, kapasitas produksi, serta daya saing daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita secara berkelanjutan (Azim, et.al 2022). Secara nasional, struktur ekonomi Indonesia masih menunjukkan konsentrasi pada sektor-sektor tertentu seperti industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan. Ketimpangan kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan belum meratanya transformasi struktural ekonomi. Studi (Fitri & Rindiani, 2024) menjelaskan bahwa transformasi struktural yang tidak inklusif berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan regional di Indonesia, terutama ketika pertumbuhan lebih terkonsentrasi pada sektor padat modal.

Kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar di Indonesia, namun kawasan ini juga tidak terlepas dari persoalan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Wilayah Indonesia Timur yang terdiri atas 12 provinsi menghadapi berbagai permasalahan strategis, terutama berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi pembangunan serta perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerataan pembangunan menjadi salah satu tujuan sekaligus strategi utama untuk menciptakan keseimbangan kesejahteraan antarwilayah. Oleh sebab itu, isu pemerataan

pembangunan perlu memperoleh perhatian yang serius dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional (Baktirani & Amin, 2022).

Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, serta alokasi anggaran daerah. Perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya variasi tingkat pertumbuhan ekonomi antarwilayah (Gobel et.al, 2025).

Gambar 1. 1 Rata - Rata Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Indonesia Bagian Timur



Sumber : Badan Pusat Statistik Data diolah (2026)

Berdasarkan grafik rata-rata pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur, Provinsi Maluku Utara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 17,29 persen, jauh melampaui provinsi lain seperti Sulawesi Tengah sebesar 10,12 persen dan Papua Barat sebesar 5,12 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa Maluku Utara sedang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat, terutama didorong oleh aktivitas industri pengolahan dan

hilirisasi pertambangan nikel. Kondisi ini menjadikan Maluku Utara sebagai wilayah yang menarik dan relevan untuk diteliti karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti dengan pemerataan pembangunan antarwilayah maupun antar sektor lapangan usaha. Oleh sebab itu, penelitian di Maluku Utara penting dilakukan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan daerah serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penetapan prioritas pembangunan perlu disesuaikan dengan karakteristik serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Mengingat setiap daerah memiliki kapasitas dan struktur ekonomi yang berbeda, maka diperlukan identifikasi terhadap sektor-sektor yang memiliki peranan dominan dan prospektif dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sekaligus pemerataan pembangunan dapat ditempuh melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah. Strategi tersebut dapat dioptimalkan melalui penguatan kebijakan pembangunan regional yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan (Juli, et.al 2024).

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota merupakan isu penting dalam proses pembangunan daerah. Adanya perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah mencerminkan ketidaksamaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari adanya daerah yang mampu tumbuh dengan cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang relatif lambat. Perbedaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing wilayah, seperti kondisi demografi, ketersediaan dan potensi sumber daya alam, pemusatan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu (aglomerasi), serta hambatan dalam kelancaran arus barang dan jasa antar daerah (Ambar, et.al 2021).

Dampak paling serius dari ketimpangan pembangunan antarwilayah akan terlihat ketika kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar. Ketimpangan yang terus meningkat antar sektor dan wilayah dapat memperbesar perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama antara daerah yang memiliki sektor unggulan dan daerah yang pertumbuhannya relatif tertinggal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan. Apabila ketimpangan ini tidak segera diatasi melalui kebijakan yang tepat dan pengembangan sektor unggulan yang merata, maka situasi tersebut dapat menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial dan konflik di masyarakat (Azim, et.al 2022).

Sebagai daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, Provinsi Maluku Utara memerlukan strategi khusus dalam merancang arah pembangunan wilayahnya. Potensi sumber daya alam yang melimpah, disertai kondisi geografis yang luas dan terpisah oleh pulau-pulau besar maupun kecil, menuntut adanya penataan serta pengelolaan wilayah yang lebih efektif. Salah satu upaya yang dinilai relevan adalah pemekaran wilayah guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui pembangunan daerah yang lebih terfokus. Kebutuhan tersebut selaras dengan perubahan paradigma pembangunan nasional, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah, di mana orientasi pembangunan mengalami pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik. Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah, memperluas penyebaran kegiatan pembangunan, mengoptimalkan pelayanan pemerintahan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal, serta meminimalkan potensi kebocoran wilayah (Subur & Nuraini, 2022).

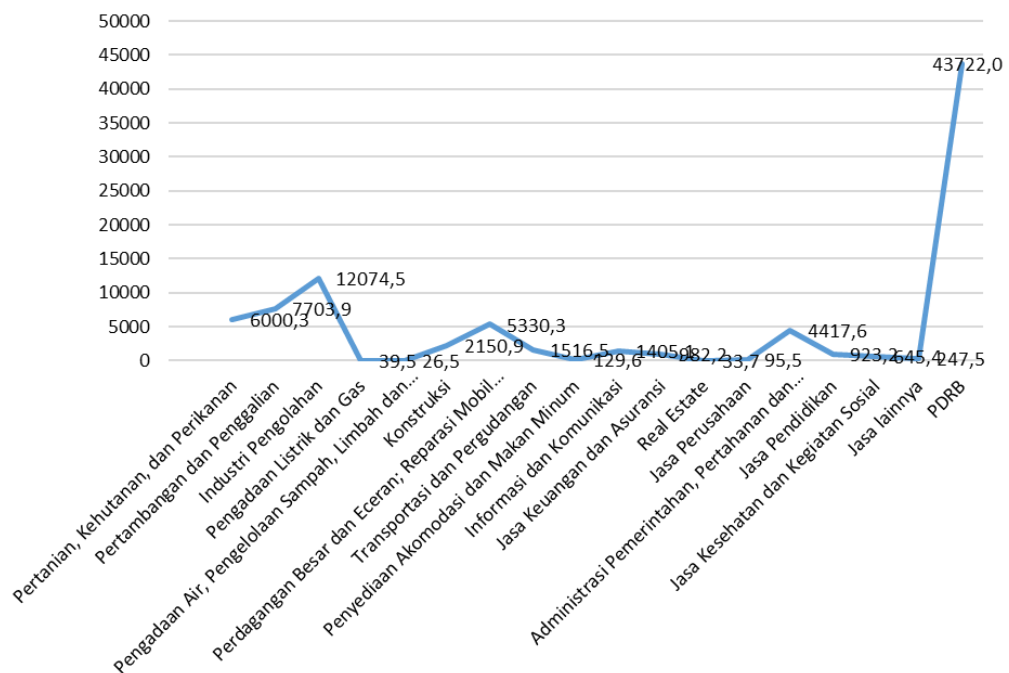
Permasalahan pembangunan di Provinsi Maluku Utara menunjukkan variasi yang cukup kompleks, terutama terkait ketimpangan infrastruktur antarwilayah dan

ketidakseimbangan dampak ekonomi sektor unggulan. Di Kabupaten Halmahera Barat, misalnya, beberapa kecamatan seperti Ibu dan Loloda masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, baik jalan raya sebagai penunjang aktivitas perekonomian maupun jaringan telekomunikasi yang belum memadai, sementara pembangunan cenderung terfokus di pusat ibu kota kabupaten. Di sisi lain, Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan emas belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal, karena penyerapan tenaga kerja lebih banyak berasal dari luar daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sektor unggulan dan aktivitas ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menjamin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah (Ambar, et.al 2021).

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik, industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan proses pengolahan atau perubahan barang mentah menjadi barang jadi, maupun mengubah barang yang bernilai rendah menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan lebih siap untuk digunakan. Keberadaan sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah dalam perekonomian daerah, yang tercermin dalam besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Abdiriyanto & Cita, 2022). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Nilai PDRB juga mencerminkan sejauh mana suatu wilayah mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Besarnya PDRB yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam serta ketersediaan faktor-faktor

produksi di daerah tersebut. Perbedaan tingkat PDRB antarwilayah umumnya terjadi karena adanya variasi dalam ketersediaan dan kemampuan masing-masing daerah dalam menyediakan serta mengoptimalkan faktor-faktor produksi (Dewanto & Rahmawati, 2021).

Gambar 1. 2 Rata – Rata Produk Domestic Regional Bruto Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 – 2025 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (Data diolah 2026)

Berdasarkan rata-rata Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara tahun 2019–2025, struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan rata-rata kontribusi sekitar 12.074,5 miliar rupiah, yang mencerminkan pentingnya kegiatan hilirisasi, khususnya pengolahan komoditas tambang seperti nikel, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sekitar 7.039 miliar

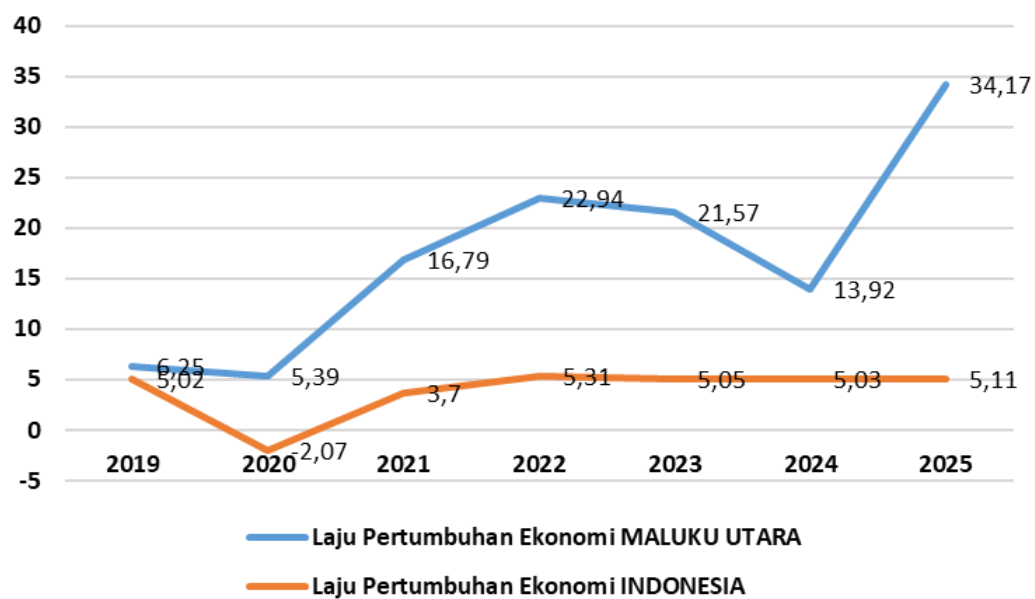
rupiah, menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi penggerak utama perekonomian Maluku Utara.

Selain sektor utama tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta administrasi pemerintahan juga turut memberikan kontribusi terhadap PDRB. Sebaliknya, sektor seperti pengadaan air dan pengelolaan sampah, jasa perusahaan, real estat, dan jasa lainnya memiliki kontribusi yang relatif rendah, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan perkembangan antar lapangan usaha. Secara keseluruhan, rata-rata nilai PDRB sebesar sekitar 43.722 miliar rupiah menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun ketergantungan pada sektor pertambangan dan industri pengolahan mengindikasikan perlunya diversifikasi dan pengembangan sektor ekonomi lainnya agar tercipta struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya nilai total serta persentase produksi agregat barang dan jasa yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) selama periode waktu tertentu. Peningkatan tersebut dapat diamati baik secara menyeluruh maupun berdasarkan sektor atau bidang usaha. Dengan demikian, pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) mencerminkan adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh daerah tersebut (Taufiqurrachman et al. 2024). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) kerap dimanfaatkan sebagai indikator dalam menilai kinerja ekonomi daerah karena mampu mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa terdistorsi oleh perubahan harga. Melalui PDRB ADHK berdasarkan lapangan usaha, dapat dianalisis besarnya kontribusi, laju pertumbuhan, serta perubahan peran tiap sektor

dalam struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu, penggunaan data PDRB ADHK menjadi penting dalam kajian ekonomi regional untuk mengidentifikasi keunggulan dan tingkat daya saing sectoral (Eliza, et,al 2025).

Gambar 1. 3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Dengan Indonesia (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara dan Indonesia (Data diolah 2026)

Berdasarkan gambar grafik mengenai perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dengan Indonesia tahun 2019–2025, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, namun memiliki tingkat fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sebesar 6,25 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mengalami kontraksi hingga -2,07 persen akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi. Setelah mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mulai menunjukkan peningkatan yang sangat

signifikan sejak tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar 34,17 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut cenderung berada pada kisaran yang relatif stabil, yaitu sekitar 5 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Maluku Utara memiliki karakteristik ekspansif karena didorong oleh sektor-sektor unggulan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Namun di sisi lain, tingginya fluktuasi tersebut juga mengindikasikan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kondisi industri, investasi, dan harga komoditas global.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara meningkat tajam hingga mencapai 16,79 persen, menjadikannya sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Tren ini berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan yang kembali melonjak hingga 22,94 persen. Menurut Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Februari 2023, tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh pesatnya sektor pertambangan dan penggalan serta industri pengolahan, seiring dengan bertambahnya jumlah smelter dan optimalisasi produksinya. Selain itu, tren positif harga nikel dunia sepanjang tahun 2022 juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja ekonomi Maluku Utara (BPS Maluku Utara, 2024).

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan sebagai indikator penting dalam perencanaan pembangunan karena mampu mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Selain memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi daerah, kedua indikator ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan guna mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Suatu masyarakat

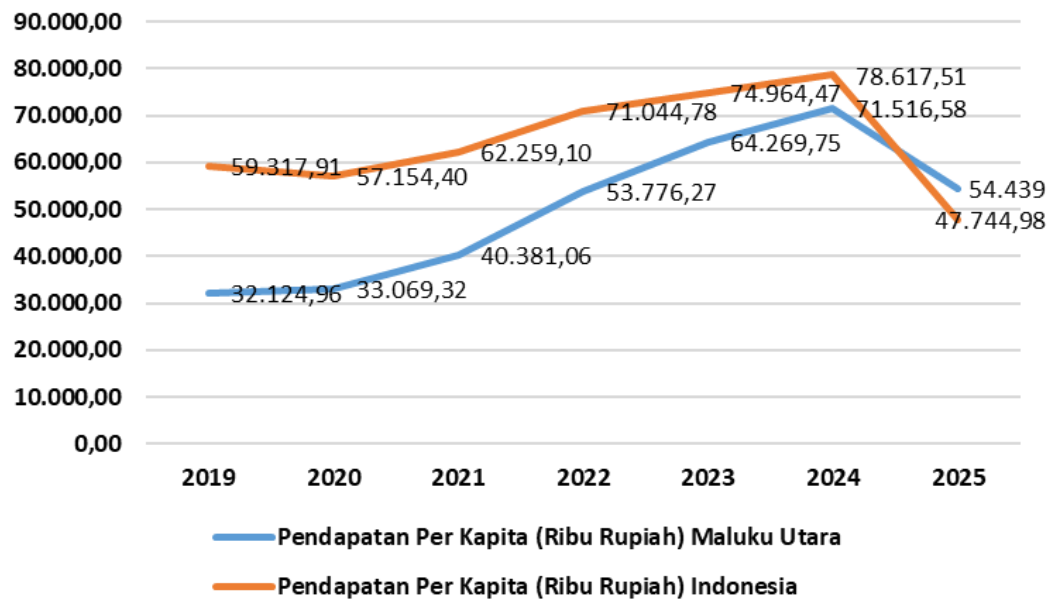
dapat dikatakan mengalami peningkatan kesejahteraan apabila pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan meningkat secara berkelanjutan dari waktu ke waktu (Laia et.al, 2025).

Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena jangka panjang dalam perekonomian yang menggambarkan arah serta besarnya peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan dari satu periode ke periode berikutnya yang dinyatakan dalam persentase, dan digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat (Yuli & Hastuti, 2020). Tingginya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara juga dipengaruhi oleh transformasi struktur ekonomi dan meningkatnya aktivitas investasi di sektor basis. Kondisi ini memperkuat posisi Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Namun demikian, ketimpangan antara pertumbuhan daerah dan nasional juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi antar wilayah, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan serta mendorong pemerataan pembangunan (Agustin, et.al 2025).

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, distribusi pendapatan, serta pemerataan hasil pembangunan. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk dan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya (Rahmawati, et.al 2024).

Gambar 1. 4 Perbandingan Pendapatan Per Kapita Provinsi Maluku Utara Dengan Indonesia (Ribu Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara dan Indonesia (Data diolah 2026)

Berdasarkan gambar grafik perbandingan pendapatan per kapita Provinsi Maluku Utara dengan Indonesia tahun 2019–2025, terlihat bahwa pendapatan per kapita Maluku Utara mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode pengamatan, meskipun nilainya masih berfluktuasi dan pada beberapa tahun berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2019 pendapatan per kapita Maluku Utara tercatat sebesar 32.124,96 ribu rupiah dan meningkat menjadi 33.069,32 ribu rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2024 pendapatan per kapita Maluku Utara mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu dari 40.381,06 ribu rupiah pada tahun 2021 menjadi 64.269,75 ribu rupiah pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah turut memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata pendapatan

masyarakat. Kondisi ini didukung oleh berkembangnya sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis hilirisasi serta aktivitas smelter nikel yang mendorong peningkatan investasi, produksi, dan kesempatan kerja di Maluku Utara.

Sementara itu, pendapatan per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024, yaitu dari 59.317,91 ribu rupiah menjadi 78.617,51 ribu rupiah. Meskipun demikian, nilai pendapatan per kapita Maluku Utara masih berada di bawah rata-rata nasional selama sebagian besar periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakat secara optimal. Pada tahun 2025, pendapatan per kapita Maluku Utara dan Indonesia sama-sama mengalami penurunan, dengan Maluku Utara menjadi 47.744,98 ribu rupiah dan Indonesia sebesar 54.439 ribu rupiah. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian yang sangat bergantung pada sektor unggulan, khususnya pertambangan dan industri pengolahan, cenderung rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan aktivitas industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sektor ekonomi lainnya agar peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pendapatan per kapita juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan aktivitas ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan produksi akan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis terhadap pendapatan per kapita menjadi penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran (Selvia, et.al 2024).

Didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Anggahariato Ambar dalam mengenai disparitas pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara periode 2015–2019 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antarwilayah tergolong rendah, namun hasil analisis Tipologi Klassen mengungkapkan adanya perbedaan struktur pertumbuhan ekonomi antar daerah, di mana Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah termasuk kategori daerah maju dan tumbuh cepat, sementara beberapa wilayah lainnya masih tergolong relatif tertinggal; kondisi ini menegaskan bahwa meskipun secara umum ketimpangan terlihat rendah, tetap terdapat konsentrasi aktivitas ekonomi pada sektor tertentu seperti pertambangan dan perdagangan yang memicu perbedaan kontribusi ekonomi antar wilayah, serta ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat ketimpangan, sehingga temuan tersebut memperkuat pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai ketimpangan dan klasifikasi lapangan usaha untuk menganalisis secara lebih mendalam struktur sektoral dan distribusi kontribusi ekonomi dalam pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara (Ambar, et.al 2021).

Penelitian lainnya oleh Maimunah et al. (2025) dalam Jurnal Media Akademik, struktur perekonomian di Provinsi Maluku Utara mengalami transformasi signifikan yang ditandai dengan pergeseran dominasi dari sektor primer menuju sektor sekunder, khususnya pertambangan dan industri pengolahan. Melalui analisis Location Quotient (LQ), Shift-Share, dan Tipologi Klassen, penelitian tersebut menemukan bahwa sektor pertambangan dan industri pengolahan telah menjadi sektor basis ($LQ > 1$) sekaligus motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan antar lapangan usaha, karena sektor pertanian yang

bersifat padat karya justru mengalami perlambatan relatif dibandingkan sektor padat modal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan struktural antar sektor ekonomi serta potensi terbentuknya enclave economy, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai ketimpangan dan klasifikasi lapangan usaha guna memahami pola disparitas sektoral dan implikasinya terhadap pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang masih relatif tertinggal dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam perekonomian daerah. Kondisi ini berdampak pada masih tingginya kemiskinan, pengangguran, serta belum meratanya distribusi pendapatan antar kabupaten/kota. Ketimpangan tersebut tidak terlepas dari perbedaan struktur dan kontribusi lapangan usaha di masing-masing wilayah, di mana beberapa sektor tumbuh lebih dominan sementara sektor lainnya berkembang lebih lambat. Padahal, Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai tingkat ketimpangan serta klasifikasi lapangan usaha untuk mengetahui sektor-sektor unggulan dan pola struktur ekonomi daerah, sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Subur & Nurain, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi regional di Indonesia masih ditandai oleh ketimpangan antarwilayah dan antarsektor lapangan usaha, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. (Fitri & Rindiani, 2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali terkonsentrasi pada wilayah dan sektor basis tertentu, seperti pertambangan dan

jasa, sehingga menciptakan perbedaan tingkat pendapatan dan kinerja ekonomi antar daerah. Melalui pendekatan Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ), dan Shift-Share, penelitian tersebut membuktikan bahwa klasifikasi wilayah dan sektor mampu menggambarkan struktur ekonomi yang timpang serta mengidentifikasi daerah maju dan tertinggal secara lebih jelas. Kondisi ini relevan dengan karakteristik perekonomian di Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi namun diduga masih menghadapi ketimpangan antar kabupaten/kota akibat dominasi sektor lapangan usaha tertentu. Oleh karena itu, penelitian mengenai ketimpangan dan klasifikasi lapangan usaha di Provinsi Maluku Utara menjadi penting untuk memberikan bukti empiris yang lebih spesifik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewanto dan Rahmawati (2021) diperoleh temuan bahwa disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia masih cukup besar, khususnya antara wilayah barat dan timur Indonesia. Melalui pendekatan Indeks Williamson dan regresi data panel pada seluruh provinsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mampu menekan tingkat ketimpangan, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pemerataan pembangunan. Di sisi lain, tingginya tingkat kemiskinan dan peningkatan PDRB per kapita justru berkorelasi positif dengan ketimpangan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan antar daerah. Dengan demikian, ketimpangan pembangunan tidak semata-mata dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh distribusi kesejahteraan dan kapasitas pengelolaan sumber daya di masing-masing wilayah. Temuan ini

memperkuat relevansi penelitian mengenai ketimpangan dan klasifikasi lapangan usaha di Provinsi Maluku Utara, karena struktur ekonomi dan kualitas pembangunan wilayah berkontribusi dalam membentuk pola kesenjangan antar sektor dan antar daerah.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Saragi et al. (2025) menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor basis sekaligus sektor unggulan di Kabupaten Karo selama periode 2016–2024, dengan nilai Location Quotient (LQ) secara konsisten lebih dari 1 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 2,59 pada tahun 2019, yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah lebih besar dibandingkan kontribusinya di tingkat Provinsi Sumatera Utara sehingga berperan sebagai sektor basis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19, sektor ini kembali pulih dan tetap mendominasi struktur ekonomi daerah, sehingga temuan ini relevan sebagai landasan empiris dalam penelitian “Ketimpangan dan Klasifikasi Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Utara” karena sama-sama menggunakan pendekatan LQ untuk mengidentifikasi sektor basis dan melihat struktur serta konsentrasi lapangan usaha yang berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi antar sektor.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat kekosongan kajian dalam analisis pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Sebagian besar studi terdahulu cenderung mengkaji ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dan identifikasi sektor unggulan secara terpisah, baik melalui Indeks Williamson dan Tipologi Klassen maupun dengan pendekatan Location Quotient (LQ) dan Shift-Share. Pendekatan yang

terpisah tersebut menyebabkan keterkaitan antara dominasi lapangan usaha tertentu dan pola ketimpangan pembangunan wilayah belum tergambarkan secara menyeluruh. Selain itu, banyak penelitian masih menggunakan periode pengamatan sebelum terjadinya lonjakan pertumbuhan ekonomi pasca 2021, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika struktur ekonomi Maluku Utara yang ditandai oleh pertumbuhan tinggi namun berfluktuasi akibat kuatnya peran sektor pertambangan dan industri pengolahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya sejalan dengan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengombinasikan analisis ketimpangan antarwilayah dengan klasifikasi lapangan usaha berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah serta menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan perbedaan dan temuan dalam penelitian terdahulu serta latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji ketimpangan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 10 daerah administrasi. Penelitian ini kemudian dirumuskan dengan judul *“Ketimpangan dan Klasifikasi Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Utara.”* Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor lapangan usaha yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menganalisis jumlah penduduk dan pendapatan per kapita guna memahami pola serta struktur pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Provinsi Maluku Utara. Melalui analisis

tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat ketimpangan dan karakteristik pembangunan ekonomi daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat potensi sektor lapangan usaha berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara?
2. Bagaimana klasifikasi daerah yang terjadi di Provinsi Maluku Utara?
3. Bagaimana tingkat ketimpangan antar wilayah Provinsi Maluku Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang:

1. Untuk menganalisis tingkat potensi sektor lapangan usaha berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara
2. Untuk menganalisis klasifikasi daerah yang terjadi Provinsi Maluku Utara
3. Untuk menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah Provinsi Maluku Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis, teoritis, dan praktis, serta menjadi bahan masukan, referensi, pertimbangan, dan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

a. Secara Akademik

Bagi Universitas Bojonegoro, penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi literatur dan referensi ilmiah, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan sebagai bahan kajian terkait ketimpangan dan struktur lapangan usaha di Maluku Utara.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pembangunan Ekonomi, khususnya dalam analisis ketimpangan dan klasifikasi lapangan usaha berbasis PDRB di tingkat daerah, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji struktur ekonomi wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

c. Secara Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan teori dan konsep Pembangunan Ekonomi yang telah dipelajari selama perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan analisis ketimpangan regional dan klasifikasi sektor basis.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran guna mengurangi ketimpangan antar lapangan usaha, memperkuat sektor basis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan pembangunan di Provinsi Maluku Utara, penelitian ini dibatasi pada pengukuran ketimpangan dan klasifikasi lapangan usaha yang ditinjau dari PDRB, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dengan perbandingan pada tingkat provinsi dan nasional (Indonesia).